

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WDP
2.	Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah terhadap 4 (empat) aspek terdiri dari : aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Pengadaan barang dan jasa, dan aspek pengelolaan barang milik daerah.	Terlaksananya Pengawasan Reguler Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan	24 Perangkat Daerah, 6 Kec
3.	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Hasil Temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Ratio Penyelesaian Tunggakan Kerugian Negara/Daerah hasil Temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	25%
4.	Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	Ratio Penanganan Pengaduan/Laporan Masyarakat	100%
5.	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi ADD dan DD,	Terlaksananya Pengawasan Reguler Pemerintahan Desa	86 Desa

PROGRAM KERJA/KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2018 :

ANGGARAN (Rp) :

- | | | |
|------|--|--|
| I. | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 | 30.000.000 |
| II. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
- Reviu RKA Murni 2019 dan RKA Perubahan Tahun 2018,
- Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa,
- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
- Peningkatan Kapabilitas APIP
- Pemutakhiran Database pada Aplikasi SIM-HP Pemda
- Pengelolaan Data Hasil Pengawasan APFP dengan aplikasi SIM-HP Pemda
- Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APFP dengan aplikasi SIM-HP Pemda
- Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APFP untuk Kepala Daerah
- Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD)
- Reviu Penerapan Kode Etik Pokja/ULP | 20.000.000
1.514.047.400
100.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
50.000.000
30.000.000
35.000.000
20.000.000
30.000.000
20.000.000 |
| III. | Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat,
- Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus) | 200.000.000 |

JUMLAH **2.129.047.400**

Buntok, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,



GANDA DAYA BINA, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19660419 198602 1 002